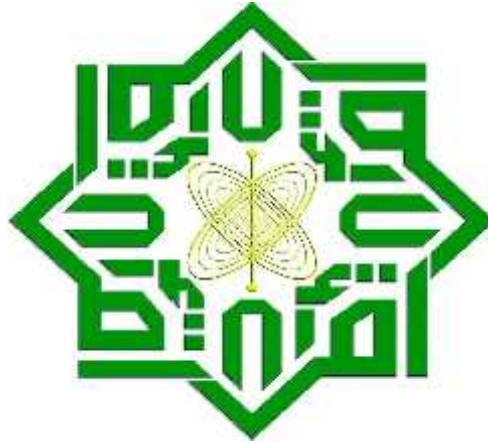


**PELAKSANAAN KONTRAK PEMBANGUNAN PARIT BETON
DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2010 (STUDI KASUS ANTARA DINAS BINA MARGA
DENGAN CV. SURYA JAYA)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*



Oleh :

MUHAMMAD ASISI

NIM. 10827003469

PROGRAM S 1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1434 H/2013 M

ABSTRAK

PELAKSANAAN KONTRAK PEMBANGUNAN PARIT BETON DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 (STUDI KASUS ANTARA DINAS BINA MARGA DENGAN CV. SURYA JAYA)

Berkenaan dengan kontrak antara Kepala Bidang Pengairan Dinas Bina Marga dengan CV.Surya Jaya, tentang pekerjaan pembuatan pembangunan parit beton jalan Sukamaju RW.07 Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau, maka dalam pelaksanaannya perlu dilihat apakah sudah sesuai atau belum dengan substansi kontrak yang telah disepakati, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Di antara pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai dengan substansi kontrak adalah, bahwa pihak kedua CV.Surya Jaya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, kemudian juga dalam masa uji coba selama 180 (seratus delapan puluh hari) setelah serah terima juga tidak sempurna dalam melakukan perbaikan. Dengan demikian maka pihak kedua telah melakukan wanprestasi, karena tidak melakukan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Sebagai contoh ada tembok parit yang retak-retak, kemudian campuran semen yang terlalu banyak pasirnya sehingga terlihat retak-retak, serta ukuran besi yang lebih kecil dan sebagainya.

Dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut bagaimana pelaksanaan kontrak antara Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis dengan Direktur CV.Surya Jaya dalam pembuatan bangunan parit beton Jalan Sukamaju di Kecamatan Mandau, serta bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak antara Kepala Bidang Pengairan Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis dengan Direktur CV.Surya Jaya dalam pembuatan bangunan parit beton jalan Sukamaju di Kecamatan Mandau.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan, dimaksudkan untuk menjelaskan serta klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan yang terjadi, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah data yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Jenis penelitian ini tidak sampai mempersoalkan jalinan hubungan variabel. Penelitian bersifat deskriptif tidak melakukan pengujian hipotesis.

Salah satu tipe penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan melalui penelitian survey, yakni tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya dilakukan secara intensif, mendalam dan komprehensif. Penelitian survey dapat dilakukan terhadap seseorang atau kelompok orang, yang ditelaah dan ditelusuri, sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Melalui metode penelitian deskriptif, hasil penelitian ini diharapkan dapat secara tepat dan rinci menjelaskan pelaksanaan kontrak pada Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis dengan CV.Surya Jaya dalam pembuatan Parit Beton Jalan Sukamaju Kecamatan Mandau.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pelaksanaan kontrak antara Kepala Bidang Pengairan Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis dengan Direktur CV.Surya Jaya dalam pembangunan Parit Beton di Jalan Sukamaju RW.07 Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau, pada prinsipnya dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Nomor.10.PPB/PPP/AIR/G.2/BM.P/VIII/2010. Namun di lapangan pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pihak kontraktor (CV.Surya Jaya) sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, tetapi melebihi jangka waktu yang ditentukan, yakni seharusnya proyek tersebut selesai pada Bulan Desember 2010, tetapi baru dapat diselesaikan pada Bulan Januari 2011. Di sini jelas bahwa pihak kedua (CV.Surya Jaya) telah melakukan wanprestasi, yakni tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut adalah, bahwa pihak pertama (Dinas Bina Marga) memutuskan bahwa pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut tetap harus diselesaikan oleh pihak kedua (CV. Surya Jaya), dengan perpanjangan waktu sebagaimana yang disepakati. Penyelesaian secara musyawarah ini diambil karena masing-masing pihak juga mempunyai kelemahan dan kekurangan. Bagi pihak kedua terlambat dalam menyelesaikan proyek karena pengaruh kondisi alam dan lingkungan, sedangkan pada pihak pertama terlambat dalam mencairkan dana karena terkait aturan yang berlaku. Oleh karena itu penyelesaian yang terbaik adalah dengan jalan musyawarah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim.

Alhamdulillah dan puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan rahmatnya, telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : **“Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Parit Beton Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 (Studi Kasus Antara Dinas Bina Marga Dengan CV. Surya Jaya)”**, untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam melakukan penulisan dan penelitian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, motifasi serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga terselesainya penulisan skripsi ini. Kemudian dari pada itu Penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Suwirman dan Ibunda Netty fitri yang tercinta, yang tidak pernah lelah berkorban dan berdoa untuk Ananda agar menjadi orang yang berguna, sehingga dapat mewujudkan cita-cita.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M. Ag. M. Pd. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu

4. Bapak H.Maghfirah,MA Sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Nuraini Sahu, SH. MH. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Drs. Hajar, M. MH. Selaku Penasehat Akademik.
7. Bapak Hurri Agustiar, ST.MT Selaku Kabid Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis.
8. Bapak Hendri Selaku Direktur CV. Surya Jaya yang telah banyak membantu penulis selama penelitian.
9. Ucapan Trimakasih juga kepada pekerja pembangunan parit beton jalan suka maju yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, karena penulis adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada penulis dan pembaca. Amin.

Pekanbaru, 19 Mei 2013

Muhammad Asisi
NIM. 10827003469

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Bina Marga Kabupaten Bengkalis	
1. Pengertian dan Sejarah Bina Marga	16
2. Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Bina Marga	17
3. Struktur Kepemimpinan Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis....	19
B. CV. Surya Jaya	
1. Sejarah dan Bidang Gerak CV. Surya Jaya	20
2. Struktur Kepemimpinan CV. Surya Jaya	23

BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERJANJIAN

A. Pengertian Perjanjian	24
B. Macam-macam Kontrak/Perjanjian	34
C. Syarat-syarat Perjanjian	37

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kontrak Antara Dinas Bina Marga dengan CV. Surya Jaya	
1. Isi Kontrak.....	41
2. Spesifikasi kontrak.....	45
3. Realisasi yang Dikerjakan CV. Surya Jaya.....	47

4. Ketidaksesuaian dengan Spesifikasi yang Disepakati.....	52
B. Penyelesaian Wanprestasi atas Pelaksanaan Kontrak antara Dinas Bina Marga dengan CV. Surya Jaya	
1. Bentuk Wanprestasi.....	58
2. Upaya CV. Surya Jaya dalam Menyelesaikan Proyek	63
3. Sikap Dinas Bina Marga.....	64
4. Penyelesaian Menurut Hukum Perdata	66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR WAWANCARA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam hidupnya senantiasa berhubungan dengan manusia yang lain, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat dan negara. Dalam melakukan hubungan tersebut berbagai hal dapat terjadi, baik hubungan tersebut dalam bentuk sahabat, teman maupun hubungan yang sifatnya bisnis, perdagangan, serta hubungan kontrak atau perjanjian dalam melakukan sesuatu hal atau pekerjaan.

Kontrak merupakan suatu kesepakatan yang diperjanjikan di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Di samping itu kontrak juga sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan.¹ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1313), menyatakan bahwa suatu kontrak merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²

¹Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), h.9

²*Ibid.*

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa kontrak atau perjanjian merupakan ikatan yang dibuat oleh dua pihak, untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasanya juga disebut, bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.³

Untuk melaksanakan berbagai program kerja yang sudah direncanakan, pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah menjalin berbagai kontrak kerja dengan berbagai pihak, salah satu bentuk kontrak tersebut dilakukan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis dengan CV.Surya Jaya, dalam pekerjaan pembuatan pembangunan parit beton jalan Sukamaju RW.07 Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau, yang tertuang dalam Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 10.PPB/PPP/AIR/G.2/BM.P/VIII/ 2010 tanggal 04 Agustus 2010.

Dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan bahwa Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan pula bahwa:

- (1) Maksud diberlakukan Keputusan Presiden ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD.

³Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010), h.3

(2) Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pada Pasal 1 angka 1 disebutkan, bahwa Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka dalam perjanjian/kontrak tersebut dinyatakan bahwa pihak pertama Sudirman Rahman selaku Kepala Bidang pada Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis memberi tugas kepada pihak kedua Hendri selaku Direktur CV.Surya Jaya, untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan pembangunan parit beton jalan Sukamaju RW.07 Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau. Pihak kedua mempunyai kewajiban kepada pihak pertama untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan, serta memperbaiki kerusakan sesuai ketentuan dan spesifikasi yang tercantum dalam Surat Perjanjian/Kontrak.⁴

Selanjutnya mengenai pengelolaan lokasi atau lapangan, disebutkan bahwa setelah penandatanganan surat perjanjian/kontrak, pihak pertama membuat berita

⁴Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 10.PPB/PPP/AIR/G.2/BM.P/VIII/2010

acara serah terima tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan lokasi/lapangan sepenuhnya kepada pihak kedua.⁵

Pihak kedua wajib menyediakan/membuat sarana dan prasarana untuk kebutuhan pengelolaan dan pengamanan lokasi/lapangan serta bertanggung jawab atas keadaan lokasi/lapangan tersebut, termasuk menempatkan satuan keamanan apabila diperlukan.⁶

Semua resiko dan kerugian di lokasi/lapangan akibat dari kejadian-kejadian, apalagi akibat kelalaian/kesalahan pihak kedua, baik yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan pelaksanaan pekerjaan yang berada di dalam dan di luar lokasi/lapangan adalah menjadi tanggung jawab dan beban biaya pihak kedua. Hal ini termasuk apabila terjadi pada lingkungan bangunan, rumah atau yang lainnya, seperti rusak, kotor, roboh/ambruk, retak dan dampak lainnya.⁷

Pihak kedua wajib memberitahukan, melaporkan kepada pihak pertama atau pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, apabila terjadi penemuan-penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah/budaya atau penemuan kekayaan Negara di lokasi pekerjaan pada masa pelaksanaan pekerjaan/kegiatan berlangsung.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka setelah kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka tahap selanjutnya adalah melaksanakan substansi kontrak. Kontrak yang dilaksanakan itu meliputi perencanaan, pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan. Masing-masing tahap itu dilaksanakan melalui

⁵*Ibid.*

⁶Hendri (Direktur CV.Surya Jaya), *Wawancara*, 30 Nopember 2012

⁷*Ibid.*

kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran yang melibatkan interaksi dan atau hubungan kerja antara kedua belah pihak.⁸

Adapun mengenai jangka waktu disebutkan, bahwa pihak kedua dalam melaksanakan pekerjaan seperti dimaksud, diwajibkan menyelesaikan serta menyerahkan seluruh hasil pekerjaan tersebut dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh hari) hari kalender, terhitung mulai tanggal 04 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2010. Apabila melampaui batas waktu yang telah disepakati, maka pihak kedua (kontraktor) dikenai denda setiap hari keterlambatan sebesar satu permil dari nilai kontrak.⁹

Jangka waktu pelaksanaan setiap bagian pekerjaan ditetapkan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan, sebagaimana tercantum pada lampiran surat perjanjian/kontrak. Waktu penyelesaian tersebut tidak dapat diubah oleh pihak kedua, kecuali pihak pertama telah memberikan persetujuan tertulis dan diatur di dalam perjanjian tambahan.

Pihak kedua setelah menyelesaikan pekerjaan dan telah melakukan serah terima, diwajibkan melakukan perbaikan, penyempurnaan dan uji coba seluruh komponen pekerjaan dalam masa pemeliharaan, selama jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Apabila pihak kedua tidak mengindahkan kewajiban tersebut, maka pekerjaan pemeliharaan akan dilaksanakan oleh pihak lain atas perintah pihak pertama dan biaya pemeliharaannya dibebankan kepada pihak kedua.¹⁰

⁸Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.116

⁹Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 10.PPB/PPP/AIR/G.2/BM.P/VIII/2010

¹⁰Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 10.PPB/PPP/AIR/G.2/BM.P/VIII/2010

Secara garis besarnya hal-hal atau uraian-uraian yang harus dimuat dalam suatu kontrak/perjanjian, yakni identitas para pihak, rumusan pekerjaan, nilai pekerjaan, masa pertanggungan dan/atau pemeliharaan, tenaga ahli, hak dan kewajiban, cara pembayaran, cedera janji, penyelesaian perselisihan, pemutusan kontrak/perjanjian, keadaan memaksa (*force majeure*), perlindungan pekerja, serta aspek lingkungan.¹¹

Berkenaan dengan kontrak antara Kepala Bidang Pengairan Dinas Bina Marga dengan CV.Surya Jaya, tentang pekerjaan pembuatan pembangunan parit beton jalan Sukamaju RW.07 Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau, maka dalam pelaksanaannya perlu dilihat apakah sudah sesuai atau belum dengan substansi kontrak yang telah disepakati, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Di antara pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai dengan substansi kontrak adalah, bahwa pihak kedua CV.Surya Jaya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, kemudian juga dalam masa uji coba selama 180 (seratus delapan puluh hari) setelah serah terima juga tidak sempurna dalam melakukan perbaikan. Dengan demikian maka pihak kedua telah melakukan wanprestasi, karena tidak melakukan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.¹² Sebagai contoh ada tembok parit yang retak-retak tidak diperbaiki oleh pihak kedua.

Di samping itu juga kurang sesuai dengan bestek atau ketentuan yang terdapat dalam gambar, seperti ukuran yang kurang, bahan-bahan yang tidak

¹¹*Op,Cit*, hlm.112

¹²Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 10.PPB/PPP/AIR/G.2/BM.P/VIII/2010

sesuai dengan yang ada dalam kontrak, serta dalam masa pengawasan selama enam bulan setelah selesai pekerjaan tersebut kurang diperhatikan oleh pihak kedua. Adapun bentuk-bentuk penyimpangan tersebut adalah campuran semen yang terlalu banyak pasirnya sehingga terlihat retak-retak, serta ukuran besi yang kecil.¹³

Pihak kedua dikatakan wanprestasi karena hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang sudah dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁴

Dari hal-hal tersebut di atas, ada indikator bahwa CV.Surya Jaya belum melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja. Melihat fenomena ini penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh, bagaimana pelaksanaan kontrak kerja antara CV. Surya Jaya dengan Dinas Bina Marga dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: “Kontrak Pembangunan Parit Beton Jalan Sukamaju Antara Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis dengan CV.Surya Jaya di Kecamatan Mandau”.

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis membatasi kajian ini hanya sebatas tentang pelaksanaan kontrak pembuatan pembangunan parit beton jalan Sukamaju antara Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis dengan Direktur CV.Surya Jaya, serta penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Pembatasan ini dimaksudkan

¹³Herman (Kepala Tukang), *Wawancara*, 30 Nopember 2012

¹⁴Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT.Intermasa, 1987), h.45

agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami pembahasan dalam penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kontrak antara Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis dengan Direktur CV.Surya Jaya dalam pembuatan bangunan parit beton Jalan Sukamaju di Kecamatan Mandau?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak antara Kepala Bidang Pengairan Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis dengan Direktur CV.Surya Jaya dalam pembuatan bangunan parit beton jalan Sukamaju di Kecamatan Mandau?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan kontrak antara Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis dengan CV.Surya Jaya dalam pembuatan bangunan Parit Beton Jalan Sukamaju di Kecamatan Mandau.
 - b. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak antara Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis dengan Direktur CV.Surya Jaya dalam

pembuatan bangunan Parit Beton Jalan Sukamaju di Kecamatan Mandau.

2. Adapun kegunaan yang hendak penulis peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
 - b. Untuk memperluas pengetahuan penulis tentang hukum perdata materil, khususnya dalam bidang kontrak atau perjanjian.
 - c. Untuk dapat dipergunakan sebagai data sekunder bagi pembaca, dan sekaligus dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian dan keperluan akademik lainnya.
 - d. Sebagai sumbangsih penulis kepada almamater, yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan, dimaksudkan untuk menjelaskan serta klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan yang terjadi, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah data yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Jenis penelitian ini tidak sampai mempersoalkan

jalanan hubungan variabel.¹⁵ Penelitian bersifat deskriptif tidak melakukan pengujian hipotesis.

Salah satu tipe penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan melalui penelitian survey, yakni tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya dilakukan secara intensif, mendalam dan komprehensif. Penelitian survey dapat dilakukan terhadap seseorang atau kelompok orang, yang ditelaah dan ditelusuri, sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Melalui metode penelitian deskriptif, hasil penelitian ini diharapkan dapat secara tepat dan rinci menjelaskan pelaksanaan kontrak pada Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis dengan CV.Surya Jaya dalam pembuatan Parit Beton Jalan Sukamaju Kecamatan Mandau.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis. Adapun dasar pengambilan lokasi penelitian ini berdasarkan kontrak pembuatan bangunan Parit Beton Jalan Sukamaju Kecamatan Mandau, antara Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis dengan kontraktor pengerjaan proyek tersebut, yakni direktur CV.Surya Jaya. Dalam hal ini perlu dilihat tentang pelaksanaan kontrak tersebut. Dimana pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak hanya sampai selesai, tetapi juga harus dilihat kualitas dan ketahanannya, hal inilah yang menjadi tanggung jawab dari pihak kedua, yang sering dilalaikan atau tidak diperhatikan di lapangan.

¹⁵Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h,20

1. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi diartikan sebagai jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan kontrak/perjanjian antara Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Bina Marga, serta hambatan dalam pelaksanaan kontrak tersebut, maka unit analisis atau populasinya adalah Perangkat pada Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis, dan Direktur CV. Surya Jaya, serta pengawas dan pekerja yang keseluruhannya berjumlah 10 orang.

b. Sampel

Dilihat dari jumlah populasi yang tidak terlalu besar, maka penulis mengambil keseluruhan dari populasi tersebut menjadi sampel dalam penelitian ini, dengan cara sensus. Adapun mengenai gambaran tentang populasi dan sampel tersebut sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I.1

Populasi dan Sampel Penelitian

No	Identitas Populasi	Populasi	Sampel
1	Kepala Bidang	1	1
2	Pejabat Pembuat Komitmen	1	1
3	Direktur CV.Surya Jaya	1	1
4	Pengawas	1	1
5	Pekerja	6	6
	Jumlah	10	10

Sumber: Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis, 2012

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam menjelaskan pelaksanaan kontrak antara Dinas Bina Marga dengan CV.Surya Jaya, maka data yang diperlukan adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang berkaitan dengan masalah penelitian, yang meliputi data tentang kontrak/perjanjian kerja, yang meliputi lingkup tugas dan pekerjaan, dasar perjanjian/kontrak, pelaksanaan pekerjaan, ketentuan administrasi umum, ketentuan administrasi pelaksanaan, serta ketentuan teknis dalam pelaksanaan pekerjaan pemborongan, yang diperoleh dari Dinas Bina Marga Bengkalis.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah tersedia di lapangan, yang berupa data tentang lokasi penelitian, yang meliputi sejarah terbentuknya Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis, tugas pokok dan tanggung jawab Dinas Bina Marga, dan struktur kepemimpinan Dinas Bina Marga Bengkalis. Di samping itu juga data mengenai sejarah dan bidang gerak CV.Surya Jaya, serta struktur kepemimpinan CV.Surya Jaya.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang representatif, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Wawancara, teknik wawancara dipergunakan untuk memperoleh data, keterangan, ataupun penjelasan dari orang-orang yang berkompeten dengan masalah yang diteliti. Teknik ini merupakan komunikasi langsung antara peneliti dengan subjek penelitian untuk memperoleh data yang lebih

akurat. Dengan teknik wawancara, peneliti memperoleh informasi yang memang hanya dapat diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden.

- b. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui pengamatan langsung ke lapangan, yakni dengan melihat hasil dari pengerjaan proyek pembangunan parit beton di Jalan Sukamaju Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

6. Analisis Data

Analisis data berbentuk kualitatif. Data yang telah diperoleh melalui wawancara dan pengamatan diolah secara sistematis sesuai permasalahan dalam penelitian. Dalam analisis data diwujudkan dalam bentuk penjelasan atau keterangan (kualitatif) yang didukung oleh data lapangan dan sumber informasi, dan dokumen yang memperkuat penjelasan dimaksud. Setelah keseluruhan jawaban informan terkumpul, kemudian dianalisis untuk menentukan pelaksanaan kontrak/perjanjian antara Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Bina Marga dengan Direktur CV. Surya Jaya dalam pembuatan bangunan Parit Beton Jalan Sukamaju, serta untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan dengan metode induktif, yakni dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam tulisan ini penulis memberikan gambaran tentang sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Lokasi Penelitian, yang berisi tinjauan tentang Bina Marga Kabupaten Bengkalis, yang meliputi pengertian dan sejarah Bina Marga, tugas pokok dan tanggung jawab Bina Marga, struktur kepemimpinan Dinas Bina Marga, CV. Surya Jaya, sejarah dan bidang gerak CV. Surya Jaya, serta struktur kepemimpinan CV. Surya Jaya.

Bab III Tinjauan Teoritis Tentang Perjanjian, yang berisi pengertian perjanjian, macam-macam kontrak/perjanjian, serta syarat-syarat perjanjian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi pelaksanaan kontrak antara Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis dengan CV.Surya Jaya yang terdiri dari isi kontrak, spesifikasi kontrak, realisasi yang dikerjakan CV. Surya Jaya, ketidaksesuaian dengan spesifikasi yang disepakati, serta penyelesaian wanprestasi atas pelaksanaan kontrak antara Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis dengan CV.Surya Jaya, yang terdiri dari bentuk wanprestasi, upaya CV. Surya Jaya dalam menyelesaikan proyek, sikap Dinas Bina Marga, penyelesaian menurut Hukum Perdata,

Bab V Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Bina Marga Kabupaten Bengkalis

1. Pengertian dan Sejarah Bina Marga

Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis adalah Satuan kerja Perangkat Daerah yang berperan dalam membantu Kepala Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang bina marga dan pengairan di daerah.¹

Dinas Bina Marga terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, serta Uraian Tugas pada Dinas Bina Marga.²

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum berubah nama menjadi Dinas Bina Marga. Hal ini dilakukan karena menyesuaikan dengan Struktur dan Organisasi Tata Kerja yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut. Oleh karena itu tugas dan fungsi Dinas Bina Marga sebenarnya sama dengan Dinas Pekerjaan Umum, hanya namanya saja yang mengalami perubahan, tetapi lingkup tugasnya sama saja, yakni yang berhubungan dengan proyek dan pembangunan pemerintah.

2. Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Bina Marga

¹Renstra Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis, 2012

²*Ibid.*

Tugas pokok Dinas Bina Marga adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Bina Marga.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Marga dan Pengairan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Bina Marga dan Pengairan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Bina Marga dan Pengairan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sehubungan dengan tugas-tugas Dinas tersebut, dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dibantu oleh staf-staf dan pegawai administrasi di lingkungannya. Sebagai Kepala Dinas tugas-tugas tersebut senantiasa dikoordinasikan kepada bidang-bidang terkait dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati.

Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris, yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyediakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

Dari tugas-tugas yang harus dilaksanakan tersebut terlihat, bahwa tugas-tugas administrasi dinas dilaksanakan oleh sekretaris yang membawahi sub-sub

bagian, yang dalam pelaksanaan tugasnya memberikan laporan kepada sekretaris, dan sekretaris melaporkan kepada Bupati.

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan evaluasi dan koordinasi kebinamargaan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi program perencanaan bangunan dan gedung.
- b. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi program perencanaan perumusan dan pemukiman.

Sehubungan dengan tugas-tugas Kepala Bidang Bina Marga tersebut di atas, jelas merupakan tugas-tugas untuk membantu Kepala Dinas, sebagaimana tugas-tugas yang digambarkan di atas. Semua tugas tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku, dan dilaporkan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Semua tugas-tugas tersebut dievalasi dan dikoordinasikan dengan bagian yang terkait, dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati.

3. Struktur Kepemimpinan Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis

Struktur kepemimpinan Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Administrasi Umum.
3. Bidang Survey dan Perencanaan Teknis
- a. Seksi Survei dan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan.
 - b. Seksi Survei dan Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan.
 - c. Seksi Survei dan Perencanaan Teknis Pembangunan Pengairan.
4. Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan.
- a. Seksi Pembangunan Jalan.
 - b. Seksi Peningkatan Jalan.
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan.
5. Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jembatan.
- a. Seksi Pembangunan Jembatan.
 - b. Seksi Peningkatan Jembatan.
 - c. Seksi Pemeliharaan Jembatan.
6. Bidang Pengairan.
- a. Seksi Pembangunan Sarana Pengairan.
 - b. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - c. Seksi Pengendalian dan Pemeliharaan Sarana Pengairan.
7. UPT Pelaksana Teknis Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.³

³*Ibid.*

Struktur organisasi Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Hal ini mengacu kepada Satuan Organisasi Tata Kerja (SOT) yang baru, artinya perubahan dari Dinas Pekerjaan Umum kepada Dinas Bina Marga.

B. CV.Surya Jaya

1. Sejarah dan Bidang Gerak CV.Surya Jaya

CV. Surya Jaya didirikan pada tanggal 26 Maret 2004 dengan Akta Notaris yang ditanda tangani oleh Rosmalina, SH, Notaris di Kabupaten Bengkalis yang berkedudukan di Mandau, dengan Direktur bernama Hendri dan Herawati sebagai anggota atau pesonaliannya

CV.Surya Jaya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan bangunan yang beroperasi di daerah Kabupaten Bengkalis, yang mendapat tugas melaksanakan pembangunan parit beton di Jalan Sukamaju Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

CV.Surya Jaya terdiri dari seorang Direktur dan beberapa personalia yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi perkantoran, mempersiapkan dokumen-dokumen lelang dan sebagainya. Dalam hal ini tugas personalia pada prinsipnya dilakukan melalui arahan dan petunjuk dari direktur.

Adapun bidang gerak dari CV. Surya Jaya adalah:

1. Menjalankan usaha dalam bidang ekspor, impor, perdagangan internasional dan interlokal sebagai grosir, supplier, leveransir dan distributor.
2. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, pengangkutan/transportasi.

3. Menjalankan usaha dalam bidang industry dan kerajinan.
4. Menjalankan usaha dalam bidang cleaning service.
5. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan bahan-bahan galian batu sungai, kerikil dan pasir.
6. Menjalankan usaha dalam bidang kontraktor, pembangunan sarana dan prasarana pemerintah dan masyarakat.⁴

Dalam hal menerima pekerjaan pembangunan parit beton di Jalan Sukamaju Kecamatan Mandau, CV.Surya Jaya melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dengan Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis, dengan mempersiapkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian
2. Surat Penunjukan Penyedia Jasa
3. Surat Penawaran
4. Addendum dokumen lelang
5. Syarat-syarat Khusus Kontrak
6. Syarat-syarat Umum Kontrak
7. Spesifikasi teknis
8. Gambar-gambar
9. Daftar kuantitas dan harga
10. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak

Sesuai dengan ketentuan kontrak, maka kedua belah pihak wajib melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing, yakni:

⁴ Akta Pendirian CV. Surya Jaya

- a. Pihak Kedua wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke dari lapangan, dan segalam pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
- b. Pihak kedua wajib melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, sampai diterima dengan baik oleh Pihak Pertama.

Pekerjaan tersebut harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua berdasarkan dokumen lelang proyek, yang terdiri dari gambar-gambar, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), dan semua perubahan sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP), serta keterangan-keterangan lainnya.

Pihak Kedua harus mempelajari gambar yang terdapat dalam dokumen kontrak dan berkonsultasi dengan Konsultan Pengawas Lapangan sebelum pekerjaan dimulai. Pihak Kedua harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan maksud dari gambar dan spesifikasi dan tidak boleh mengambil keuntungan atas setiap kesalahan atau kekurangan dalam gambar atau perbedaan antara gambar dan spesifikasi serta Pihak Kedua harus menandai dan memperbaiki setiap kesalahan atau kekurangan tersebut.

1. Struktur Kepemimpinan CV.Surya Jaya

Struktur kepemimpinan CV. Surya Jaya terdiri dari:

- a. Direktur.
- b. Wakil Direktur

- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Ditambah dengan pengawai personalia yang bertugas menyelesaikan administrasi perkantoran.

Di sini terlihat bahwa struktur kepemimpinan yang ada pada CV. Surya Jaya tidak terlalu banyak, karena secara operasional perkantoran telah dilakukan secara keseluruhan oleh bagian administrasi. Sedangkan tingkat pimpinan melakukan pengurusan terhadap proyek-proyek di lapangan, dan mengadakan perjanjian dengan pihak lain sesuai dengan bidang usaha yang dilakukan oleh perusahaan.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERJANJIAN

A. Pengertian Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Selanjutnya ada pula beberapa syarat untuk perjanjian atau kontrak yang berlaku umum tetapi diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Kontrak harus dilakukan dengan iktikad baik, artinya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu dengan sukarela dan tanpa paksaan, serta dengan iktikad yang benar-benar mau melaksanakan isi perjanjian yang disepakati.
2. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya isi dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat.
3. Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, artinya perjanjian yang telah disepakati harus mengikuti asas yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat.

4. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak yang dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam masyarakat.¹

Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan. Oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya.

Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi tersebut dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian.
3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.
4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.²

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara kalau sampai di pengadilan.³

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka,

¹Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h.16

²Djoko Trianto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), h.61

³*Ibid.*

ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.⁴

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.⁵

Hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁶

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui, bahwa kontrak atau perjanjian merupakan hubungan antara seorang dengan orang lain bersepakat untuk melaksanakan sesuatu hal yang dapat menimbulkan akibat hukum.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁷

⁴Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h.17

⁵Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h.1

⁶Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.4

⁷R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1985), h.304

Di sini dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian, merupakan perbuatan hukum dimana dua pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal, yang merupakan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁸

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam suatu kontrak.
- b. Asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam suatu kontrak para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.

⁸*Ibid*, hlm.307

- c. Asas *Fakta Sunt Servanda*, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut.
- d. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk tertulis.
- e. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata.⁹

Asas-asas tersebut di atas merupakan asas yang timbul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian. Dalam suatu kontrak asas tersebut secara tidak langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak adalah timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu maka semua asas tersebut di atas muncul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian.

Sebagaimana diketahui bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini

⁹Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), h.13

dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas, namun sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun.
- c. Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.
- d. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa ini kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Dari syarat-syarat kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui, bahwa segala sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu kontrak haruslah sesuatu yang jelas dan halnya tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya ada pedoman atau patokan agar tidak terjadi kesalahpahaman kedua belah pihak yang berjanji. Oleh karena itu segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

¹⁰Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010), h.13

Para pihak dalam kontrak konstruksi, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa. Penyedia jasa terdiri atas perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi. Masing-masing penyedia jasa ini harus terdiri dari orang perorangan atau badan usaha yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pengguna jasa mempunyai hubungan dengan para perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi. Adapun para pihak dalam kontrak konstruksi adalah sebagai berikut:

1. Perencana Konstruksi, ada dua pihak yang terikat dalam pelaksanaan kontrak perencanaan konstruksi, yaitu pengguna jasa dan perencana konstruksi. Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa perencanaan.
2. Pelaksana Konstruksi, para pihak yang terkait dan mempunyai hubungan hukum dalam pelaksanaan kontrak konstruksi adalah pengguna jasa konstruksi dan pelaksana jasa konstruksi. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli atau profesional di bidang pelayanan jasa konstruksi. Pelaksana konstruksi tersebut mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya

3. Pengawas Konstruksi, merupakan salah satu pihak dalam kontrak konstruksi, yang bertugas melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan terimakan.¹¹

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perjanjian atau kontrak yang dilakukan antara Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis dengan Direktur CV.Surya Jaya yang tertuang dalam Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 10.PPB/PPP/AIR/G.2/BM.P/VIII/2010 tentang pekerjaan pembuatan bangunan Parit Beton Jalan Sukamaju Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau.

Sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah disepakati bersama, bahwa Pihak Kedua wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang rinci dalam kontrak. Selanjutnya Pihak Kedua juga wajib melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, sampai diterima dengan baik oleh Pihak Pertama.¹²

Selanjutnya dalam Pasal 9 Surat Perjanjian/Kontrak tersebut dinyatakan pula bahwa:

1. Jangka waktu pelaksanaan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari kalender.
2. Apabila sampai berakhir masa pelaksanaan pekerjaan yang disepakati, ternyata pelaksanaan pekerjaan belum selesai, maka Pihak Pertama dan

¹¹Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.95

¹²Kontrak Nomor: 10.PPB/PPP/AIR/G.2/BM.P/VIII/2010

Pihak Kedua melakukan justifikasi kontrak yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹³

Selanjutnya Pasal 2 Surat Perjanjian/Kontrak tersebut juga menjelaskan bahwa:

- a. Untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan, Pihak Pertama menunjuk Pengawas Lapangan untuk dan atas nama Pihak Pertama dan diberitahukan secara tertulis pada Pihak Kedua.
- b. Pemimpin Kegiatan bertugas membantu Pengguna Anggaran dalam hal teknis pekerjaan serta memberikan petunjuk kepada pengawas yang berkaitan dengan pekerjaan dan kepada Pihak Kedua.¹⁴

Dari rumusan di atas dapat dipahami, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan tersebut harus dicantumkan secara jelas dalam suatu perjanjian/kontrak, sehingga tugas dari masing-masing bagian akan dapat diketahui dengan jelas.

Suatu asas hukum yang penting berkaitan dengan berlakunya kontrak atau perjanjian adalah kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya, dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketetapan umum, dan kesusilaan.¹⁵

Berlakunya asas kebebasan berkontrak tersebut dijamin oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menentukan bahwa “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatannya memenuhi syarat, berlaku bagi para pembuatnya, sama seperti perundang-undangan. Pihak-

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.16

pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan menuangkan apa saja di dalam isi sebuah kontrak.

Ketentuan hukum yang ada di dalam KUH perdata hanya bersifat pelengkap saja, yang baru akan berlaku bagi pihak-pihak apabila pihak-pihak tidak mengaturnya sendiri di dalam isi kontrak, kecuali ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa yang memang wajib dipatuhi. Oleh karena itu, disebutkan bahwa hukum perjanjian dalam KUH Perdata bersifat terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memakai atau tidak memakainya. Apabila para pihak tidak mengaturnya sendiri di dalam kontrak, berarti dianggap telah memilih aturan dalam KUH Perdata tersebut.

Dalam hukum kontrak dikenal beberapa asas, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Asas Konsensualisme, artinya bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah kontrak.
2. Asas kebebasan berkontrak, artinya memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:
 - a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
 - b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
 - c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian.
 - d. Bebas menentukan bentuk perjanjian, dan
 - e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Asas mengikatnya kontrak, artinya setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.
4. Asas iktikad baik, merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat

(3) KUH Perdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁶

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka semua perjanjian atau kontrak haruslah memperhatikan asas-asas tersebut agar dalam pelaksanaannya dapat memberikan kepuasan terhadap kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian atau kontrak tersebut.

B. Macam-Macam Kontrak/Perjanjian

Bentuk kontrak/perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak).

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
2. Perjanjian dengan saksi notaries untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaries atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut

¹⁶Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007), h.3

tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaries dalam bentuk akta notaries. Akta notaries adalah akta yang dibuat dihadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaries, camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.¹⁷

Dari ketiga bentuk atau jenis perjanjian tersebut, dapat dilihat bahwa perjanjian yang dibuat notaries artau di muka notaries merupakan perjanjian yang mempunyai kekuatan hokum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hokum atau yuridis.

Ada tiga fungsi dari akta notaris (akta autentik), yaitu:

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.¹⁸

¹⁷Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.43

¹⁸*Ibid*, h.43

Sehubungan dengan fungsi akta notaries tersebut di atas, adalah untuk alat bukti ketika suatu perjanjian atau kontrak mengalami sesuatu masalah, sehingga yang menjadi alat bukti yang autentik adalah akta notaries tersebut.

Macam-macam perjanjian sebenarnya tergantung dari munculnya perjanjian itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada bermacam-macam perjanjian sebagaimana tergambar di bawah ini.

1. Perjanjian untuk Memberikan Sesuatu

Mengenai perjanjian untuk memberikan sesuatu, undang-undang tidak menggambarkan secara sempurna. Pasal 1235 KUH perdata, menyebutkan: “Dalam tiap-tiap perjanjian untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban diberi utang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan.

2. Perjanjian untuk Berbuat Sesuatu

Berbuat sesuatu artinya melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan (perjanjian). Jadi wujud prestasi di sini adalah melakukan perbuatan tertentu, misalnya melakukan perbuatan membongkar tembok, mengosongkan rumah, membuat lukisan atau patung dan sebagainya. Pasal 1236 KUH Perdata menyebutkan: “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban, memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.

3. Perjanjian untuk Tidak Berbuat Sesuatu

Tidak berbuat sesuatu artinya tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak melakukan perbuatan, misalnya tidak melakukan persaingan yang diperjanjikan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1242 KUH Perdata “Jika perjanjian itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika yang berbuat berlawanan dengan perjanjian, karena pelanggaran itu dan karena itu saja, berwajiblah ia akan menggantian biaya, rugi dan bunga.

Kewajiban penggantian biaya, rugi dan bunga bagi debitur dalam suatu perikatan baru dilakukan apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan atau ingkar janji pada tenggang waktu yang ditentukan.

C. Syarat-Syarat Perjanjian

Sebagaimana diketahui bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak merupakan unsure mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas, namun sebaliknya

seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun.

- c. Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.
- d. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa ini kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Dari syarat-syarat kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui, bahwa segala sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu kontrak haruslah sesuatu yang jelas dan halnya tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya ada pedoman atau patokan agar tidak terjadi kesalahpahaman kedua belah pihak yang berjanji. Oleh karena itu segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Demikian juga halnya dengan akibat hukum perjanjian yang berisi causa yang tidak halal ialah batal, dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di muka hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa causa (sebab), ia dianggap tidak pernah ada.

Para pihak dalam kontrak konstruksi, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa. Penyedia jasa terdiri atas perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan

¹⁹Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010), h.13

pengawas konstruksi. Masing-masing penyedia jasa ini harus terdiri dari orang perorangan atau badan usaha yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pengguna jasa mempunyai hubungan dengan para perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi. Adapun para pihak dalam kontrak konstruksi adalah sebagai berikut:

1. Perencana Konstruksi, ada dua pihak yang terikat dalam pelaksanaan kontrak perencanaan konstruksi, yaitu pengguna jasa dan perencana konstruksi. Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa perencanaan.
2. Pelaksana Konstruksi, para pihak yang terkait dan mempunyai hubungan hukum dalam pelaksanaan kontrak konstruksi adalah pengguna jasa konstruksi dan pelaksana jasa konstruksi. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli atau profesional di bidang pelayanan jasa konstruksi. Pelaksana konstruksi tersebut mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya
3. Pengawas Konstruksi, merupakan salah satu pihak dalam kontrak konstruksi, yang bertugas melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.²⁰

Ketiga pihak tersebut merupakan para pihak yang harus ada dalam suatu perjanjian konstruksi atau bangunan yang menggunakan dana pemerintah atau negara. Pihak-pihak yang bersangkutan masing-masing mempunyai hak dan

²⁰Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.95

kewajiban dalam penyelesaian suatu proyek pemerintah. Demikian juga halnya dengan terjadinya hal-hal yang menyangkut pembangunan tersebut, baik kondisi bangunan maupun perawatan selama jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian atau kontrak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kontrak antara Dinas Bina Marga dan CV.

Surya Jaya

1. Isi Kontrak

Sebuah kontrak tentunya mempunyai aturan atau pedoman yang harus dilaksanakan, agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara jelas dan nyata sesuai apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Demikian juga halnya dengan perjanjian kontrak antara Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis dengan CV. Surya Jaya, dalam pelaksanaan pekerjaan jasa pemborongan pembangunan parit beton jalan Sukamaju Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Bengkalis, yang mengatakan bahwa lingkup pekerjaan yang harus dilakukan oleh CV.Surya Jaya dalam Pembangunan Parit Beton Jalan Sukamaju RW.07 Kelurahan Duri Barat, sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian pekerjaan ini mengikat kedua belah pihak, dilakukan oleh Kontrak Harga Satuan, yaitu penyelesaian seluruh pekerjaan ini dilakukan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan, dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara.

- b. Jumlah volume dan nilai kontrak yang sebenarnya, dihitung berdasarkan pelaksanaan di lapangan (volume terpasang), dan dengan ketentuan bahwa pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan/terpasang oleh pihak kedua (kontraktor).¹

Sehubungan dengan ketentuan yang harus dilakukan oleh pihak kedua (kontraktor/CV.Surya Jaya), maka dalam melakukan pekerjaan senantiasa dilakukan pengawasan oleh Pengawas Lapangan dan Pengawas Konsultan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 Surat Perjanjian/Kontrak yang telah disepakati. Adapun pengawas lapangan yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua (CV.Surya Jaya), ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Hal ini juga dijelaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Bengkalis, yang mengatakan bahwa petugas pengawas lapangan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran, agar lebih jelas dan memberikan kekuatan dalam melakukan tugasnya di lapangan.²

Jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai penawaran, dan harus diserahkan dalam bentuk surat jaminan pelaksanaan dari Bank Pemerintah atau Bank Umum oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum penandatanganan surat perjanjian.

Jaminan pelaksanaan pekerjaan tersebut harus mempunyai masa berlaku 14 (empat belas) hari melebihi masa pemeliharaan pekerjaan, dan akan

¹Hurri Agustianri (Kepala Bidang Pengairan), *Wawancara*, 27 Nopember 2012

²Endang Mulyadi (Pejabat Pembuat Komitmen), *Wawancara*, 28 Nopember 2012

dikembalikan kepada pihak kedua pada 14 (empat belas) hari setelah masa pemeliharaan pekerjaan selesai dilaksanakan, diterima baik oleh pihak pertama yang dinyatakan dengan suatu Berita Acara Serah Terima pekerjaan secara keseluruhan.

Jaminan ini bertujuan agar pihak kedua benar-benar serius untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan. Oleh karena itu jaminan ini bentuk dari pertanggungjawaban dari pihak kedua terhadap pekerjaan yang sudah diterimanya.

Apabila selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa, ternyata pihak kedua belum menyerahkan jaminan pelaksanaan, maka pihak kedua tersebut dianggap mengundurkan diri dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, artinya pihak pertama dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Dalam surat jaminan pelaksanaan pekerjaan tersebut harus ada ketentuan bahwa jaminan pelaksanaan pekerjaan menjadi milik negara yang dapat dicairkan oleh pihak pertama tanpa persetujuan pihak kedua, bilamana terjadi pemutusan perjanjian pekerjaan dengan memperhitungkan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak kedua.³

Pada prinsipnya isi kontrak tersebut berisi kesepakatan antara Dinas Bina Marga Bengkalis dengan CV.Surya Jaya, dalam pengerjaan proyek parit Beton di Jalan Sukamaju Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

³Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Nomor. 10.PPB/PPP/AIR/G.2/BM.P/VIII/2010

Apabila pihak kedua mengundurkan diri setelah menandatangani surat perjanjian kontrak, maka jaminan pelaksanaan menjadi milik daerah, yang disetorkan ke kas daerah, dan apabila pihak kedua melanggar ketentuan ini, maka pihak pertama dapat membatalkan pihak kedua sebagai pemenang lelang.

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa pihak kedua pemenang lelang harus mampu bertanggung jawab terhadap apa yang telah diterimanya. Konsekuensi dari pengunduran diri tersebut tentu ada, kemungkinan nama dari perusahaan tersebut sudah mendapat catatan bagi panitia lelang, untuk pelelangan yang akan datang perusahaan tersebut tidak boleh ikut.

Di sini terlihat bahwa perusahaan pemenang lelang harus ada bukti jaminan agar perusahaan yang bersangkutan memang benar-benar melaksanakan pekerjaan yang telah diterimanya pada waktu menang tender. Bangunan proyek pemerintah tidak sama dengan menerima proyek dari individu atau perseorangan, proyek pemerintah dilakukan pelelangan secara resmi dan dengan mekanisme yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi pihak kedua tidak bisa memutuskan begitu saja, karena sudah melalui mekanisme administrasi yang cukup panjang, sehingga memang harus dipertanggungjawabkan, karena sudah melibatkan banyak orang dan sudah dilaporkan kepada pimpinan.

2. Spesifikasi Kontrak

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pemborong pembangunan parit beton Jalan Sukamaju RW.07 Kelurahan Duri Barat Parit Beton, maka yang menjadi dasar pekerjaan tersebut adalah Dokumen Lelang Proyek, yang terdiri dari gambar-gambar (termasuk gambar-gambar detail), Rencana Kerja dan Syarat-

Syarat Kerja (RKS) dan semua perubahan sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP), dan keterangan-keterangan lainnya.⁴

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pemborongan tersebut harus mengikuti spesifikasi gambar yang telah disepakati bersama berikut dengan konstruksinya. Demikian juga halnya dengan peralatan yang harus dipersiapkan oleh kontraktor.

Sebelum pekerjaan galian dilakukan terlebih dahulu dilakukan pembersihan di sepanjang parit beton tersebut. Pekerjaan galian dilakukan di sepanjang rencana tapak yang dilakukan secara manual dengan kapasitas yang telah ditentukan. Setelah pekerjaan galian selesai, dilaksanakan cor lantai kerja beton bertulang dengan tebal 10 Cm, dengan memakai baja tulangan. Setelah lantai dicor dilanjutkan dengan pemasangan dinding batu bata $\frac{1}{2}$ bata dan 1 bata campuran 1:2 yang bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan bestek, selama pekerjaan dinding dipasang pipa resapan 1 inci, dengan ketentuan jarak yang telah ditentukan. Setelah pekerjaan dinding selesai dilanjutkan dengan pekerjaan plester dinding bata 1:2 dan pembuatan skor beton bertulang yang letaknya berada di atas dinding saluran dengan jarak 3 Meter kulaitas coran 1:2:3.⁵

Dengan demikian maka fungsi kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis kontrak adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sedangkan fungsi

⁴Endang Mulyadi (Pejabat Pembuat Komitmen), *Wawancara*, 28 Nopember 2012

⁵Perjanjian Pelaksanaan Pemborongan Nomor.10.PPB/PPP/AIR/G.2/BM.P/VIII/2010

ekonomisnya adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.⁶

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pemborongan pembangunan Parit Beton Jalan Sukamaju RW.07 Kelurahan Duri Barat, maka kedua belah pihak telah sepakat dan setuju, bahwa biaya pelaksanaan pekerjaan ditetapkan sebesar Rp.264. 178.000,- (dua ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).⁷

Nilai kontrak tersebut merupakan biaya-biaya yang dipergunakan untuk pembangunan Parit Beton Jalan Sukamaju RW.07 Kelurahan Duri Barat. Dengan demikian maka pihak kedua (kontraktor) harus dapat melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Adapun cara-cara untuk terjadinya penawaran dan penerimaan dapat dilakukan secara tegas maupun dengan tidak tegas, yang penting dapat dipahami atau dimengerti oleh para pihak bahwa telah terjadi penawaran dan penerimaan.⁸

Sehubungan dengan hal tersebut maka pihak kedua (kontraktor) harus mengerti dan memahami spesifikasi kontrak yang telah disepakati, karena berhubungan dengan hasil kerja yang akan dicapai. Apabila hasil kerja tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, maka pihak pertama dapat

⁶Salim. HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), h.45

⁷Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Nomor. 10.PPB/PPP/AIR/G.2/BM.P/VIII/2010

⁸Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada), 2010, h.14

melakukan klaim dan meminta kepada pihak kedua untuk melakukan perbaikan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Sebagaimana halnya yang ditemui di lapangan, bahwa campuran semen dengan pasir terlalu banyak pasirnya, serta ukuran besi yang terlalu kecil, maka pihak pertama dapat melakukan penolakan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak kedua tersebut.

3. Realisasi yang Dikerjakan CV. Surya Jaya

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pemborongan Parit Beton Jalan Sukamaju RW.07 Kelurahan Duri Barat, maka pelaksanaan pembayarannya diatur dalam Pasal 6 Perjanjian Kontrak Nomor.10.PPB/PPP/AIR/G.2/BM.P/VIII/2010, yang menyatakan bahwa:

1. Kedua belah pihak menyetujui pembayaran nilai kontrak pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan angsuran pembayaran (*termijn*) atas dasar realisasi prestasi kerja.
2. a. Untuk setiap pembayaran angsuran (*termijn*), Pihak Kedua diwajibkan menyertakan Laporan Rincian Kemajuan Fisik Pekerjaan, Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan, Back up Dana, Hasil Pengujian Lapangan dan Uji Mutu, dokumentasi pelaksanaan dan lain-lain yang diperlukan.
- b. Adapun yang diperhitungkan sebagai kemajuan fisik pekerjaan adalah bagian-bagian pekerjaan yang telah selesai dikerjakan (volume terpasang), memenuhi persyaratan, disetujui dan diterima baik oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

3. Pembayaran angsuran dilakukan setelah bagian pekerjaan yang bersangkutan (volume terpasang), telah diperiksa dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan.
4. Pihak Pertama harus sudah membayar kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak Pihak Kedua telah mengajukan tagihan yang lengkap dan benar, dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang ditandatangani oleh PPTK.
5. Dari setiap pembayaran angsuran, oleh Pihak Pertama akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai aturan perpajakan yang berlaku.⁹

Berkenaan dengan hal tersebut di atas sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, bahwa pembayaran dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Penilaian tersebut dilakukan oleh Pengawas Lapangan yang telah ditunjuk disertai dengan berkas-berkas berita acara yang telah ditentukan.¹⁰

Dengan demikian dapat dilihat bahwa pembayaran yang dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua memang dilakukan sesuai dengan target kerja yang telah tercapai, hal ini memang sudah menjadi persetujuan kedua belah pihak sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kontrak sebagaimana yang disebutkan di atas.

Adapun jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan pemborongan Parit Beton di Jalan Sukamaju RW.07 Kelurahan Duri Barat adalah sebesar 5% (Lima Persen)

⁹Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Nomor. 10.PPB/PPP/AIR/G.2/BM.P/VIII/2010

¹⁰Endang Mulyadi (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Ady Candra (Pengawas Lapangan), Wawancara, 28 Nopember 2012

dari nilai penawaran, yaitu sebesar Rp.13.208.900,- (tiga belas juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah), diserahkan dalam bentuk Surat Jaminan Pelaksanaan dari Bank Pemerintah atau Bank Umum, oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum penandatanganan Surat Perjanjian.

Jaminan pelaksanaan pekerjaan mempunyai masa berlaku 14 (empat belas) hari melebihi masa pemeliharaan pekerjaan, dan akan dikembalikan kepada Pihak Kedua pada 14 (empat belas) hari setelah masa pemeliharaan pekerjaan selesai dilaksanakan, diterima oleh Pihak Pertama yang dinyatakan dengan suatu Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan, untuk pekerjaan secara keseluruhan. Apabila dalam masa 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ), ternyata Pihak Kedua belum menyerahkan jaminan pelaksanaan, maka Pihak Kedua tersebut dianggap mengundurkan diri.

Dari sini jelas bahwa suatu proyek pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan tidak dibenarkan melakukan pengerjaan pemborongan sekehendak hati dari pihak pemborong saja, tetapi mempunyai aturan main yang telah tersusun secara sistematis dan jelas.

Dalam Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan, harus ada ketentuan bahwa jaminan pelaksanaan menjadi milik negara yang dapat dicairkan oleh Pihak Pertama, tanpa persetujuan dari Pihak Kedua apabila terjadi pemutusan perjanjian pekerjaan dengan memperhitungkan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua. Apabila Pihak Kedua mengundurkan diri setelah menandatangani Surat Perjanjian, maka jaminan pelaksanaan menjadi milik negara (disetor ke Kas Daerah), dan apabila Pihak Kedua melanggar ketentuan

yang tertuang dalam perjanjian, maka Pihak Pertama dapat membatalkan Pihak Kedua sebagai Pemenang Lelang.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Bengkalis yang mengatakan, bahwa suatu pekerjaan pemborongan proyek pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan waktu dan spesifikasi yang telah disetujui dalam gambar. Apabila ketentuan tersebut tidak dapat dilakukan oleh Pihak Kedua (Kontraktor), maka pencairan dana yang berikutnya dapat depending sampai pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan perjanjian.¹¹

Selanjutnya seluruh beban pajak dan lain-lain akibat dari Surat Perjanjian yang telah disepakati, sudah termasuk dalam nilai kontrak, dan harus dibayar oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni 10% (sepuluh persen) pada saat kontrak ditandatangani. Kemudian mengenai asuransi, yakni khusus untuk asuransi tenaga kerja, Pihak Kedua harus menyelenggarakan asuransi jaminan social tenaga kerja (Jamsostek) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Sehubungan dengan penjelasan dan keterangan yang disampaikan oleh Kabid Pengairan tersebut dapat diketahui, bahwa pada saat perjanjian pemborongan Jalan Sukamaju tersebut ditandatangani, maka kewajiban pajak dan asuransi dilunasi oleh Pihak Kedua dengan segera, karena begitu ditandatangani kontrak tersebut maka kontraktor secepatnya melaksanakan pekerjaan pemborongan tersebut tanpa menunda waktu. Oleh sebab itu semua kewajiban

¹¹Hurri Agustianri (Kepala Bidang Pengairan), *Wawancara*, 27 Nopember 2012

¹²*Ibid.*

yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut harus segera dilunasi dan dilaksanakan.

Mengenai jangka waktu pelaksanaan sampai selesai 100% (seratus persen) terhadap pekerjaan ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 19 yang berbunyi: “efektivitas waktu pelaksanaan pekerjaan tetap memperhatikan batas akhir tahun anggaran”. Demikian juga halnya dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis menyatakan, bahwa Jangka Waktu Pelaksanaan yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tidak diperkenankan melewati bulan Desember/ akhir tahun.¹³

Berkenaan dengan ketentuan tersebut, kenyataan di lapangan bahwa pihak kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu, melainkan melebihi dari jangka waktu yang ditentukan, demikian juga dengan kualitas bangunan kurang memuaskan. Dengan demikian maka pihak pertama (pemerintah daerah) mengambil kebijakan bahwa pekerjaan proyek tersebut harus dilanjutkan oleh perusahaan lain dengan tanggung jawab tetap pada pihak kedua.

4. Ketidaksesuaian dengan Spesifikasi yang Disepakati

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Hurri Agustianri sebagai Kepala Bidang Pengairan yang mengatakan, bahwa pekerjaan pemborongan Parit Beton di Jalan Sukamaju RW.07 Kelurahan Duri Barat tersebut memang harus

¹³Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Nomor.10.PPB/PPP/AIR/G.2/BM.P/VIII/2010

dilaksanakan dan diselesaikan menurut perjanjian yang telah disepakati, karena batas waktu tersebut berhubungan dengan masa anggaran yang telah ditentukan.¹⁴

Namun dalam kenyataannya di lapangan pekerjaan pemborongan Parit Beton tersebut tidak dapat diselesaikan sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan. Hal ini disebabkan karena kondisi cuaca yang musim hujan, galian parit yang longsor, serta pengerjaan yang juga terkesan lambat karena jumlah pekerja yang kurang memadai, dan juga peralatan yang masih minim dan sebagainya.¹⁵

Sehubungan dengan hal tersebut tentunya perlu perhatian dan penyelesaian dengan baik, karena pekerjaan proyek pemerintah yang telah dilakukan pelelangan tidak boleh tidak siap, karena berhubungan dengan anggaran atau uang negara yang telah dikeluarkan dan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa tiap-tiap perikatan atau perjanjian adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.¹⁶

Dari pelaksanaan proyek pengerjaan Parit Beton di Jalan Sukamaju Kelurahan Duri Barat tersebut apabila dihubungkan dengan Pasal 1234 KUH Perdata, bahwa pekerjaan tersebut dilakukan tetapi tidak sempurna dan tidak tepat waktu yang telah diperjanjikan, maka pihak kedua dalam hal ini telah melakukan wanprestasi, artinya melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

¹⁴Hurri Agustianri (Kepala Bidang Pengairan), *Wawancara*, 27 Nopember 2012

¹⁵Ady Candra (Pengawas Lapangan), *Wawancara*, 28 Nopember 2012

¹⁶Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h.223

Namun menurut Bapak Hendri Direktur CV.Surya Jaya mengatakan, bahwa keterlambatan pengerjaan proyek tersebut bukan karena kesalahan teknis tetapi lebih kepada kondisi alam, karena musim hujan. Oleh karena itu peralatan yang digunakan juga tidak bisa dimaksimalkan pada waktu musim hujan, terutama kendaraan yang membawa material seperti tanah, kerikil, batu dan sebagainya mengalami kesulitan pada waktu musim hujan.¹⁷

Dari sini jelas bahwa sanggahan yang dikemukakan oleh pihak kontraktor tidak dapat dibenarkan karena pengerjaan suatu proyek memang sudah diberi waktu yang cukup. Oleh karena itu walaupun kondisi musim hujan, dengan tenggang waktu yang cukup panjang tersebut diperkirakan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan tersebut pihak kontraktor tidak dapat melaksanakannya, maka pihak kontraktor sudah dapat dikatakan melakukan wanprestasi, karena melakukan prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Dengan demikian maka pihak pertama juga perlu untuk memberikan ketegasan kepada pihak kedua yang mengerjakan proyek tersebut dengan cara memberikan teguran agar supaya proyek tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Apabila pihak kedua dapat memberikan penjelasan kepada pihak pertama tentang kendala yang dihadapi tersebut tentunya pihak pertama mempunyai pertimbangan untuk melakukan langkah-langkah dan mengambil solusi yang terbaik dalam penyelesaian proyek tersebut.¹⁸

¹⁷Hendri (Direktur CV.Surya Jaya), *Wawancara*, 30 Nopember 2012

¹⁸Hurri Agustianri (Kepala Bidang Pengairan), *Wawancara*, 27 Nopember 2012

Demikian juga halnya yang diungkapkan oleh Herman selaku Kepala Tukang yang mengatakan, bahwa keterlambatan dalam pembangunan parit beton tersebut memang banyak kendala, seperti terlambatnya datang peralatan material yang diperlukan, kuangnya peralatan yang dapat mempercepat proses pembangunan dan sebagainya.¹⁹

Sehubungan dengan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa keterlambatan dalam pelaksanaan proyek parit beton tersebut memang disebabkan oleh beberapa faktor, namun demikian yang namanya proyek pemerintah bagaimanapun sulitnya harus diselesaikan karena sudah dianggarkan dalam anggaran APBD dan harus dipertanggungjawabkan kepada DPRD sesuai dengan aturan yang berlaku.

Oleh karena itu Pihak Kedua wajib membuat laporan berkala baik mengenai kemajuan pekerjaan secara keseluruhan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian. Pihak Kedua juga wajib membuat catatan yang jelas mengenai kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan jika diminta oleh Pihak Pertama untuk keperluan pemeriksaan sewaktu-waktu dapat diserahkan. Segala laporan dan catatan dibuat dalam bentuk buku harian rangkap tiga yang diisi pada formulir yang telah disetujui oleh pengawas dan harus selalu berada ditempat pekerjaan.²⁰

Sehubungan dengan hal tersebut Ady Candra selaku Pengawas Lapangan mengatakan, bahwa pihak kedua selaku pemborong juga ada melakukan kesalahan bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap catatan harian yang

¹⁹Herman (Kepala Tukang), *Wawancara*, 30 Nopember 2012

²⁰Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Nomor.10.PPB/PPP/AIR/G.2/BM.P/VIII/2010

dibuat oleh pihak kedua (kontraktor) ternyata tidak lengkap dan tidak dilakukan pada setiap hari kerja, hanya dilakukan pada waktu tertentu saja. jadi pihak pengawas akan mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan terhadap tahap-tahap pengerjaan proyek tersebut.²¹

Selanjutnya Pihak Kedua wajib membuat dan menyerahkan kepada Pihak Pertama foto atau gambar perkembangan pembangunan proyek. Hal ini diperlukan untuk mengetahui perkembangan dari pembangunan yang telah dilaksanakan, dan juga untuk kebutuhan laporan dan pemeriksaan. Kemudian juga harus dapat ditunjukkan gambar pelaksanaan atau gambar pembangunan yang telah terpasang dan sampai pembangunan tersebut selesai. Semua perintah dan peringatan dari Pihak Pertama, kondisi cuaca dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dicatat dalam buku Harian oleh Pihak Kedua.

Semua dokumen tersebut diperlukan guna untuk memberikan penjelasan kepada pihak pertama apabila terjadi sesuatu hal yang kurang berkenan bagi pihak pertama. Oleh karena itu pihak kedua harus senantiasa siap dengan segala dokumen yang diperlukan tersebut agar semuanya menjadi jelas tanpa menimbulkan kecurigaan bagi masing-masing pihak.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa pembangunan parit beton tersebut tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Hal ini disebabkan karena kurangnya peralatan atau sarana, terlambatnya barang-barang

²¹Ady Candra (Pengawas Lapangan), 28 Nopember 2012

material masuk ke proyek. Ditambah lagi dengan kurangnya pro aktif dari kontraktor dalam memantau perkembangan proyek.²²

Demikian juga sebagaimana yang diungkapkan oleh Purwantoro salah seorang pekerja proyek yang mengatakan, bahwa proyek pembangunan parit beton di Jalan Sukamaju Kelurahan Duri Barat tersebut memang mengalami keterlambatan karena faktor cuaca dan faktor keterlambatan kedatangan bahan-bahan material seperti semen, batu dan sebagainya.²³

Setelah mengerjakan proyek selesai sesuai dengan perjanjian, maka ada masa pemeliharaan yang ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung sejak dilakukan serah terima antara Pihak Pertama (Dinas Bina Marga) dengan Pihak Kedua (CV.Surya Jaya). Dalam masa pemeliharaan tersebut Pihak Kedua Diwajibkan melakukan perbaikan, penyempurnaan dan uji coba seluruh komponen pekerjaan agar tetap sempurna sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.²⁴

Sehubungan dengan pengerjaan proyek Parit Beton di Jalan Sukamaju RW.07 Kelurahan Duri Barat, memang penyelesaiannya agak terlambat yang seharusnya selesai pada bulan Desember 2010, namun oleh pihak kontraktor baru dapat diselesaikan akhir Januari 2011. Hal ini memang menunjukkan ketidaksesuaian dengan perjanjian yang telah disepakati, demikian juga halnya dengan spesifikasi yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan, seperti campuran semen dengan pasir yang terlalu banyak pasirnya, ukuran besi yang

²²Ady Candra (Pengawas Lapangan), *Wawancara*, 28 Nopember 2012

²³Purwantoro (Pekerja), *Wawancara*, 30 Nopember 2012

²⁴Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Nomor.10.PPB/PPP/AIR/G.2/BM.P/VIII/2010

terlalu kecil, tetapi pihak Dinas Bina Marga tetap melanjutkan proyek tersebut oleh Pihak Kedua (CV.Surya Jaya), dengan masa pemeliharaan sesuai dengan yang tercantum pada kontrak, yakni dimulai pada waktu serah terima pertama selesainya proyek tersebut.²⁵

Dengan demikian maka proyek tersebut dapat diterima oleh Pihak Pertama dengan catatan bahwa Pihak Kedua harus konsekuen mengikuti perjanjian yang telah disepakati, yakni melakukan pengerjaan proyek sampai selesai dan sampai dengan batas waktu pemeliharaan proyek tetap harus dilaksanakan sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang telah disepakati bersama.

Apabila pihak pertama (Dinas Bina Marga) tidak dapat menerima pengerjaan proyek tersebut, maka pihak pertama dapat memindahkan kepada pihak lain, dengan tanggung jawab biaya tetap berada pada pihak kedua, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 Kontrak, yakni “apabila Pihak Kedua tidak mengindahkan kewajiban dalam penyelesaian dan pemeliharaan proyek tersebut, maka akan dikerjakan oleh pihak lain atas perintah Pihak Pertama”.

B. Penyelesaian Wanprestasi atas Pelaksanaan Kontrak antara

Dinas Bina Marga dengan CV. Surya Jaya

1. Bentuk Wanprestasi

Sehubungan dengan pengerjaan proyek pembangunan Parit Beton di Jalan Sukamaju RW.07 Kelurahan Duri Barat oleh CV. Surya Jaya selaku kontraktor dalam pengerjaan proyek tersebut, tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan

²⁵Endang Mulyadi (Pejabat Pembuat Komitmen), *Wawancara*, 28 Nopember 2012

kekeliruan. Oleh sebab itu semua kesalahan yang terjadi dalam pengerjaan proyek tersebut tentunya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, bahwa pekerjaan proyek pembangunan parit beton di Jalan Sukamaju RW.07 Kelurahan Duri Barat memang terlambat dari kesepakatan yang telah dibuat dalam kontrak. Namun pihak pertama berharap kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut walaupun agak terlambat. Keterlambatan tersebut disebabkan karena kondisi cuaca dan keterlambatan bahan material.²⁶

Keterlambatan tersebut dapat dipahami oleh pihak pertama (Dinas Bina Marga). Di samping terlambat pihak kedua juga melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, seperti campuran pasir yang terlalu banyak, dan ukuran besi yang terlalu kecil, tetapi dalam hal terjadinya kerusakan terhadap pembangunan parit beton tersebut, maka pihak kedua harus bertanggung jawab untuk memperbaiki dalam masa pemeliharaan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak atau perjanjian.²⁷

Sebagaimana dijelaskan dalam kontrak, bahwa jangka waktu pemeliharaan adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai serah terima pertama pekerjaan, antara pihak pertama dengan pihak kedua. Dalam masa pemeliharaan pihak kedua diwajibkan melakukan perbaikan, penyempunaan dan

²⁶Amin (Pekerja), *Wawancara*, 30 Nopember 2012

²⁷Hurri Agustianri (Kabid Pengairan), *Wawancara*, 27 Nopember 2012

uji coba seluruh komponen pekerjaan agar tetap sempurna sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.²⁸

Namun dalam masa pemeliharaan tersebut pihak kedua tidak dapat melaksanakan dengan baik, sehingga pihak pertama melimpahkan kepada pihak lain dengan beban biaya ditanggung oleh pihak kedua.²⁹

Sehubungan dengan keterlambatan dan ketidaksempurnaan pekerjaan dalam masa pemeliharaan, maka pihak kedua dikenakan denda keterlambatan satu permil dari nilai kontrak, dan pembayaran denda tersebut dilakukan dengan cara pemotongan terhadap pembayaran angsuran yang diterima oleh pihak kedua.³⁰

Menurut Munir Fuady, praktek dari aplikasi ganti rugi akibat adanya wanprestasi dari suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan, dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Ganti rugi saja;
2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi;
3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi;
4. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi;
5. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.³¹

Menurut Ahmadi Miru, Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak wanprestasi harus menanggung akibat akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:

²⁸Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Nomor.10.PPB/PPP/AIR/G.2/BM.P/VIII/2010

²⁹Ady Candra (Pengawas Lapangan), *Wawancara*, 28 Nopember 2012

³⁰Endang Mulyadi (Pejabat Pembuat Komitmen), *Wawancara*, 28 Nopember 2012

³¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 30

1. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).
2. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).³²

Akibat adanya wanprestasi ada 4 (empat), yaitu:

1. Perikatan tetap ada.

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi apabila ia terlambat memnuhi prestasi.

2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur.
3. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.³³

Berkenaan dengan perjanjian pekerjaan pemborongan Parit Beton di Jalan Sukamaju RW.07 Kelurahan Duri Barat, antara Pihak Pertama (Dinas Bina Marga) dengan Pihak Kedua (PT.Surya Jaya) selaku kontraktor yang mengerjakan kontrak tersebut, maka dalam pelaksanaannya terjadi keterlambatan dan ketidak sempurnaan dalam pemeliharaan, maka kepada pihak kedua tetap melaksanakan pekerjaan proyek tersebut dengan cara membayar denda atau ganti rugi sebagai akibat dari keterlambatan dan ketidak sempurnaan dalam pemeliharaan tersebut.

³² Ahmadi Miru, *Log Cit*, h.75

³³ . Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 98.

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu salah satu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1445 KUHPerdata). Menurut Undang-undang

Ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk adanya keadaan memaksa, yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi,
- b. Ada sebab yang terletak di luar kesehatan debitur,
- c. Faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Pasal 1244 KUHPerdata menyatakan bahwa: “Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”³⁴

Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan, bahwa walaupun dalam keadaan memaksa atau kondisi alam yang membuat pekerjaan tersebut tidak sempurna, tetapi pihak kedua (CV. Surya Jaya) selaku pemenang tender tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukannya.

2. Upaya CV. Surya Jaya dalam Menyelesaikan Proyek

Sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, bahwa apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pembangunan proyek tersebut, maka pihak

³⁴ Ahmadi Miru, *Op Cit*, h.13

kedua (kontraktor) harus bertanggungjawab terhadap penyelesaian proyek tersebut, karena sudah berjalan dan sudah pula dianggarkan. Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh CV. Surya Jaya dalam menyelesaikan proyek tersebut adalah dengan cara meminta Dinas Bina Marga untuk memberikan kelonggaran dengan cara menambah tenggang waktu yang telah diperjanjikan untuk melanjutkan proyek tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh pihak kedua (kontraktor).

Kemudian pihak kedua juga mengajukan permohonan kepada pihak pertama (pemerintah daerah) agar kiranya diberi perpanjangan waktu dan mencairkan dana yang masih tersisa untuk melanjutkan pembangunan tersebut.

Di sini terlihat bahwa begitu pentingnya penyelesaian suatu proyek karena berhubungan dengan keuangan negara yang harus dipertanggung jawabkan, oleh karena itu pihak perusahaan atau pihak kedua harus senantiasa dapat menyelesaikan kontrak tersebut secara baik.

Di samping itu pihak kedua (kontraktor) juga tidak dapat melepaskan diri begitu saja, karena secara hukum yang harus bertanggungjawab tersebut adalah pihak kedua sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian. Oleh karena itu pemerintah harus juga menerapkan aturan yang berlaku dalam perjanjian, yakni pihak kedua harus segera mungkin dapat menyelesaikan proyek yang bersangkutan.

Upaya yang dilakukan oleh pihak kedua (kontraktor) tersebut memang sudah tergolong wajar, karena pembangunan yang dilakukan adalah untuk

kepentingan masyarakat umum. Sehingga harus benar-benar dapat diselesaikan secara baik dan berkualitas.

Pengerjaan suatu proyek memang tidak semudah apa yang dibayangkan berbagai kendala dapat dialami di lapangan, sehingga keterlambatan tersebut memang diakibatkan oleh beberapa hal, seperti terjadinya musim hujan yang bekepanjangan, kemudian material yang sulit sampai ke lapangan. Oleh karena itu pihak pertama juga harus memahami hal tersebut. Kemudian dengan kebijakan yang nyata maka pihak kedua mencari solusi, yakni dengan mencari solusi yang terbaik untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut. Hal inilah yang dilakukan oleh CV. Surya Jaya, ketika proyek yang dikerjakannya mengalami hambatan atau tidak selesai pada waktu yang ditentukan, maka solusi yang terbaik adalah dengan meminta kepada Dinas Bina Marga untuk dapat memperpanjang waktu kontrak, dengan beban dan tanggung jawab tetap berada pada CV. Surya Jaya sebagai pemenang tender.

3. Sikap Dinas Bina Marga

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan proyek Parit Beton di Jalan Sukamaju RW.07 Kelurahan Duri Barat oleh CV.Surya Jaya) selaku kontraktor pembangunan, maka keterlambatan yang disebabkan karena kondisi cuaca dapat dipahami oleh pihak pertama, dan pihak pertama berharap pihak kedua dapat menyelesaikan proyek tersebut, dengan perpanjangan waktu sebagaimana permohonan yang dilakukan oleh pihak kontraktor sampai proyek tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Di sini terlihat bahwa penyelesaian yang dilakukan tersebut tergolong kepada penyelesaian secara damai, artinya pihak pertama harus memahami kendala yang dihadapi oleh pihak kedua selaku kontraktor. Oleh karena itu proyek yang dilaksanakan tersebut harus dapat diselesaikan sampai kepada masa pemeliharaan dan perbaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Hendri selaku Direktur CV.Surya Jaya yang mengatakan, bahwa proyek yang dilakukan oleh perusahaannya tetap dilaksanakan walaupun terjadi keterlambatan, karena kondisi cuaca yang musim hujan dan membuat keterlambatan pemasukan bahan-bahan material. Kemudian juga dalam masa pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab pihak kedua, secara keseluruhan tanggung jawab tetap pada CV.Surya Jaya. Oleh karena itu pihak kontraktor juga harus memperhitungkan biaya pemeliharaan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kontrak.³⁵

Terhadap solusi yang diambil oleh kedua belah pihak yakni CV. Surya Jaya dan Dinas Bina Marga selaku pihak pertama yang menyerahkan pengerjaan proyek tersebut kepada pihak kontraktor dapat menerima penyelesaian proyek tersebut sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Dengan syarat pihak kedua (CV. Surya Jaya) tetap bertanggung jawab terhadap biaya yang dikeluarkan dalam proses penyelesaian proyek tersebut sesuai dengan perjanjian.

Pada prinsipnya Dinas Bina Marga menginginkan proyek tersebut dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang telah diperjanjikan. Apapun solusi

³⁵Hendri (Direktur CV.Surya Jaya), *Wawancara*, 30 Nopember 2012

yang diambil oleh pihak kedua (CV. Surya Jaya) pihak pertama (Dinas Bina Marga) dapat menerimanya, asalkan proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.³⁶ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pihak Dinas Bina Marga dapat menerima penyelesaian proyek tersebut walaupun dalam waktu yang sudah melewati apa yang telah diperjanjikan, namun yang lebih penting adalah proyek tersebut dapat diselesaikan, karena berguna bagi masyarakat secara umum.

4. Penyelesaian Menurut Hukum Perdata

Sehubungan dengan penyelesaian kontrak kerja antara Dinas Bina Marga dengan CV.Surya Jaya dalam pengerjaan Parit Beton di Jalan Sukamaju RW.07 Kelurahan Duri Barat, yang mana penyelesaiannya terlambat dari waktu yang telah diperjanjikan dan tidak sesuai dengan bestek atau gambar.

Prestasi perjanjian merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan objek perjanjian. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai dengan jaminan harta.

Adapun sifat dari prestasi itu adalah sebagai berikut:

1. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. Hal ini memungkinkan debitur memenuhi perjanjian tersebut.
2. Harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya.

³⁶Hurri Agustianri (Kepala Bidang Pengairan), *Wawancara*, 27 Nopember 2012

3. Harus diperbolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
4. Harus ada manfaat bagi kreditur, artinya kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya.
5. Terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan.³⁷

Berkenaan dengan hal tersebut secara teori kontrak atau perjanjian antara Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis dengan CV.Surya Jaya, untuk melaksanakan pekerjaan pemborongan pembangunan parit beton di jalan Sukamaju Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, adalah sah dan sudah sesuai dengan sifat-sifat dari prestasi perjanjian yang disebutkan di atas.

maka terdapat kesepakatan damai antara kedua belah bahwa pengerjaan proyek tersebut tetap dilanjutkan dengan menambah tenggang waktu selama 6 (enam) bulan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dalam hal terjadinya keterlambatan dan bangunan yang tidak sesuai dengan bestek, maka sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24, maka penyelesaiannya adalah dengan cara musyawarah dan mufakat.

Menurut Hukum Perdata penyelesaian terhadap suatu kasus perdata memang dianjurkan melalui jalur perdamaian. Sebagaimana diketahui bahwa

³⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.202

ketika sidang pertama digelar di pengadilan, maka majelis hakim pasti menawarkan perdamaian antara kedua belah pihak.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 154 R.Bg dijelaskan bahwa, “Apabila pada hari sidang yang ditentukan, kedua belah pihak hadir maka Pengadilan Negeri dengan perantara ketua berusaha mengadakan suatu perdamaian antara kedua belah pihak”. Apabila perdamaian itu tercapai maka seketika itu juga perdamaian dibuat di persidangan dengan suatu akte dimana kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perjanjian mereka itu, akte tersebut mempunyai kekuatan dan dijalankan seperti keputusan hukum di pengadilan, terhadap keputusan damai ini tidak dapat dimintakan lagi banding.³⁸

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, maka Dinas Bina Marga selaku pihak pertama yang memberikan pengerjaan proyek tersebut kepada pihak kedua (CV. Surya Jaya), melakukan kesepakatan bersama bahwa pengerjaan proyek terus dilakukan dengan penambahan waktu selama 6 (enam) bulan sebagaimana yang telah disepakati, dan pihak kedua untuk tetap menyelesaikan proyek tersebut sesuai dengan perjanjian.

Apabila proyek tersebut tidak selesai juga dalam jangka perpanjangan waktu, tidak sesuai dengan bestek dan dibiarkan begitu saja oleh pihak kedua, maka proyek tersebut dapat dialihkan oleh pihak pertama kepada pihak ketiga, dengan tanggung jawab pembiayaan tetap pada pihak kedua sesuai dengan dana yang sudah dikururkan, dan sisa dari anggaran proyek tersebut dapat dialihkan

³⁸Henry Lee A.Weng, *Peraturan Peradilan di Daerah Luar Jawa dan Madura*, (Medan: Fakultas Hukum USU, 1987), h.58

kepada pihak ketiga yang mengerjakan proyek tersebut sampai dengan masa perbaikan selama 1 (satu) tahun.

Hal ini dilakukan secara damai dan mufakat antara kedua belah pihak, karena pihak kedua sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pengerjaan proyek tersebut, karena kekurangan peralatan pendukung dan kondisi alam yang bertepatan pada musim hujan, sehingga material susah untuk masuk ke proyek yang bersangkutan.

Dengan demikian maka proyek tersebut dapat dialihkan kepada pihak ketiga, karena proyek pemerintah tersebut harus dapat diselesaikan karena berhubungan dengan anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proyek parit beton yang dikerjakan oleh pihak kedua tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat untuk menghindari banjir dan pengikisan parit yang dapat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu untuk kepentingan umum, maka pengerjaan proyek tersebut harus dapat diselesaikan sesuai dengan tujuannya.

Jadi ketentuan dalam Hukum Perdata, bahwa penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak yang terbaik adalah dengan jalan damai, karena perdamaian tersebut merupakan jalan yang terbaik dan tidak membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak bila dibandingkan penyelesaian yang dilakukan melalui proses hukum di pengadilan.

Pengerjaan proyek Parit Beton tersebut memang tidak terlepas dari kendala, pihak kedua yang mengerjakan proyek banyak mengalami kendala di

lapangan mulai dari kondisi alam, lingkungan dan sebagainya. Bagi pihak pertama (Dinas Bina Marga) juga mengalami kendala, yakni dalam hal pencairan dana yang harus mengikuti aturan yang berlaku, yang adakalanya terlambat dalam pencairan dana, hal ini juga dapat mempengaruhi proses pengerjaan proyek.

Oleh karena itu masing-masing pihak mempunyai kelemahan, maka jalan yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan jalan damai, karena perdamaian merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan pengadilan.

Sehubungan penyelesaian kasus keterlambatan pengerjaan proyek pengerjaan parit beton yang dilakukan oleh Cv.Surya Jaya tersebut menurut penulis memang sudah tepat dilakukan secara musyawarah dan mufakat, karena kalau sampai ke pengadilan maka akan menjadi lama dan tidak bisa selesai dalam waktu cepat, tetapi dengan musyawarah dan mufakat maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan segera.

Dengan musyawarah dan mufakat tersebut jalan keluarnya cepat dapat ditemukan, dan pengerjaan proyek dapat dilanjutkan dengan segera, karena proyek tersebut merupakan fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, maka kelanjutan dari pengerjaan proyek tersebut yang lebih penting, bukan mencari kesalahan masing-masing, yang akan memakan waktu yang lama sehingga proyek tersebut dapat terbengkalai sehingga merugikan masyarakat. Jadi dengan musyawarah dan mufakat tersebut merupakan jalan yang terbaik dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pengerjaan proyek parit beton tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kontrak antara Kepala Bidang Pengairan Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis dengan Direktur CV.Surya Jaya dalam pembangunan Parit Beton di Jalan Sukamaju RW.07 Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau, pada prinsipnya dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Nomor.10.PPB/PPP/AIR/G.2/BM.P/VIII/2010. Namun di lapangan pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pihak kontraktor (CV.Surya Jaya) sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, tetapi melebihi jangka waktu yang ditentukan, yakni seharusnya proyek tersebut selesai pada Bulan Desember 2010, tetapi baru dapat diselesaikan pada Bulan Januari 2011. Di sini jelas bahwa pihak kedua (CV.Surya Jaya) telah melakukan wanprestasi, yakni tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
2. Penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah dengan cara damai, bahwa pihak pertama (Dinas Bina Marga) memutuskan bahwa pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut tetap harus diselesaikan oleh pihak kedua (CV. Surya Jaya), dengan perpanjangan waktu sebagaimana yang telah disepakati. Penyelesaian secara damai dalam kasus ini juga dianjurkan dalam Hukum Perdata, karena masing-masing pihak juga

mempunyai kelemahan. Pada pihak kontraktor terlambat dalam menyelesaikan proyek, dan pada pihak Dinas Bina Marga juga terlambat dalam pencairan dana karena terkait aturan yang berlaku. Jadi penyelesaian damai merupakan jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada aparat pemerintah daerah yang ada pada Dinas Bina Marga Kabupaten Bengkalis agar kiranya dapat memilih perusahaan yang memang benar-benar mempunyai kualifikasi yang baik untuk dapat melakukan pengerjaan proyek pemerintah. Pemenang tender memang betul-betul dilakukan dengan penilaian yang sesuai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak didasarkan kepada hal-hal yang lain.
2. Kepada pihak kontraktor (CV.Surya Jaya) hendaknya dapat menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut dengan baik, karena merupakan fasilitas umum yang berguna bagi masyarakat dan tidak untuk pribadi. Oleh karena itu pekerjaan proyek tersebut memang benar-benar dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam perjanjian, dan tidak asal selesai saja sehingga hasil dari pembangunan proyek tersebut memang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- A Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Djoko Trianto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Mandar Maju, Bandung, 2004
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1983
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Badung, 2003
- R.Subketi dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985
- R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta, 1987
- Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- _____, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987

_____, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1984

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa